

AKSES  TERBUKA **ARTIKEL**

Diterima **Dimensi Arsip Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kepulauan Riau: Warisan Budaya, Pembentuk Identitas, Tulang Punggung Manajemen, Penentu Arah Pembangunan**

Disetujui *Archive Dimensions in Sustainable Development in the Riau Islands: Cultural Heritage, Identity Formation, Management Backbone, Determinants of Development Direction*

Diterbitkan
Desember 2024

DOI **Shanti Yesi Belina Oktaviana¹**
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau¹

 shantiyesi1987.sy@gmail.com¹

081374289670

Abstrak: Dimensi warisan budaya menjadi salah satu indikator pembangunan kebudayaan yang selaras dengan konteks pembangunan berkelanjutan. Warisan budaya tidak lepas dari konteks arsip sebagai memori yang membangun paradigma baru tentang sisi lain arsip. Arsip sebagai warisan dokumenter yang memperkuat nilai-nilai budaya melayu dan Islam sebagai keunggulan yang dimiliki Kepulauan Riau dalam pembangunan berkelanjutan. Arsip memiliki nilai guna informasi dan kesejarahan yang digunakan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan Kepulauan Riau dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan budaya melayu. Isu-isu kebudayaan menggambarkan belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis budaya di Kepulauan Riau, mulai dari keterbatasan infrastruktur, skema regulasi dan kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga terbatasnya aksesibilitas dan sumber daya informasi dalam pengelolaan arsip-arsip yang bernilai sejarah budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun wawasan tentang arsip, dimana arsip merupakan warisan dokumenter sekaligus sumber informasi dalam penguatan kebudayaan yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsip memiliki berbagai dimensi yang berperan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari keberadaan arsip sebagai warisan budaya, pembentuk identitas dan citra daerah, tulang punggung manajemen, hingga penentu arah pembangunan.

Kata Kunci: Arsip; Pembentuk Identitas; Penentu Arah Pembangunan; Tulang Punggung Manajemen; Warisan Budaya

Abstrack : *The cultural heritage dimension is one of the indicators of cultural development that is in line with the context of sustainable development. Cultural heritage cannot be separated from the context of archives as a memory that builds a new paradigm about the other side of archives. Archives as a documentary heritage that strengthens the values of Malay culture and Islam as an advantage of the Riau Islands in sustainable development. Archives have information and historical value that are used in determining the direction and goals of the development of the Riau Islands while adhering to the values of Malay religion and culture. Cultural issues illustrate the suboptimal development of a culture-based economy in the Riau Islands, ranging from limited infrastructure, regulatory and policy schemes, lack of community participation, to limited accessibility and information resources in the management of archives of cultural historical value. The purpose of this research is to build insight into archives, where archives are documentary heritage as well as a source of information in strengthening culture which is one of the important elements in sustainable development. This research is a descriptive qualitative research with a data collection method in the form of a literature study. The results of the study show that archives have various dimensions that play a role in sustainable development, ranging from the existence of archives as cultural heritage, shaping regional identity and image, the backbone of management, to determining the direction of development.*

Keywords: *Archives; Cultural Heritage; Determinant of Development Direction; Identity Formation; Management Backbone*

I. PENDAHULUAN

Isu-isu pembangunan menyentuh semua sektor kehidupan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, keamanan, kebudayaan, hingga sektor kemaritiman. Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dengan potensi dan karakteristik yang unik sebagai daerah kepulauan. Salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kepulauan Riau adalah nilai budaya melayu dan Islam sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Pembangunan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian pembangunan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah dilihat dengan menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang melibatkan dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Selain itu, untuk mengukur efektivitas pembangunan kebudayaan dilakukan komparasi terhadap sektor-sektor yang saling berkaitan seperti Indeks kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (*Kebudayaan Dalam Perbandingan: Analisis Komparatif Atas IPK Dan Enam Indeks Terkait*, 2023). Data analisis komparatif menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPK Provinsi Kepulauan Riau selalu berada diatas rata-rata IPK nasional.

Tabel 1.1 Perbandingan IPK Nasional dengan IPK Provinsi Kepulauan Riau

Tahun	IPK Nasional	IPK Kepulauan Riau
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59.24
2021	51.90	52.12
2022	55.13	56.50
2023	57.13	59.80

Sumber : <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, 2024

Salah satu dimensi yang memiliki pengaruh terhadap kemajuan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kepulauan Riau adalah warisan budaya. Definisi variabel warisan budaya digambarkan sebagai upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Sebagaimana data indeks pembangunan kebudayaan telah menunjukkan bahwa warisan budaya di Kepulauan Riau berpengaruh terhadap naik turunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kepulauan Riau.

Tabel 1.2 Perbandingan Variabel Warisan Budaya terhadap IPK Provinsi Kepri

Tahun	Dimensi Warisan Budaya	IPK Kepulauan Riau
2019	47,84	60.90
2020	45,53	59.24
2021	37,81	52.12
2022	43,18	56.50
2023	51,91	59.80

Sumber : <https://ipk.kemdikbud.go.id/>, 2024

Konteks warisan budaya tidak luput dari keberadaan arsip sebagai memori. Keterkaitan arsip, memori, dan warisan budaya menjadi landasan pemahaman untuk menilik sisi lain dari fungsi arsip secara global. Arsip sebagai repositori memori yang dapat membuktikan sejarah masa lalu sekaligus menjadi refleksi muatan budaya, salah satunya dalam bentuk warisan dokumenter (*documentary heritage*). Warisan budaya kerap kali dianggap sebagai representasi sejarah suatu komunitas yang melahirkan identitas komunal hingga akhirnya membentuk “citra” suatu daerah. Citra daerah menggambarkan potensi dan kearifan lokal sebagai pijakan bagi daerah untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Di sisi lain, arsip juga menjadi sumber informasi dan rekam jejak kegiatan pemerintah, seperti halnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Isu tata kelola pemerintahan menjadi salah satu aspek yang ditelaah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Fungsi arsip bagi perencanaan yang membutuhkan data dan bukti (*evidence*) yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan maupun arah kebijakan pembangunan. Bahkan, bidang kearsipan

telah menjadi salah satu indeks dalam penilaian reformasi birokrasi.

Ironisnya, dimensi arsip dalam konteks pembangunan selama ini hanya dinilai dari aspek administratif. Perlu dibangun paradigma bahwa arsip memiliki nilai guna secara komprehensif yang akan berdampak terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dimensi arsip dalam membangun *branding/citra* Kepulauan Riau sebagai tanah melayu yang sarat dengan nilai budaya dan agama akan menjadi pintu masuk pembangunan Kepulauan Riau yang berkarakteristik. Berangkat dari pandangan dan sisi lain arsip, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang dimensi arsip dalam membangun Kepulauan Riau. Peran vital arsip dalam tata kelola pemerintahan sebagai tulang punggung manajemen, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Arsip menjadi sumber informasi yang secara historis berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dan informasi berupa studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019). Selain itu, pengumpulan informasi dalam studi kepustakaan juga mencakup artikel internet maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan kearsipan dan pembangunan kebudayaan. Dalam penelitian kualitatif bersifat kepustakaan, terdapat beberapa prosedur yang dijalankan yaitu: menelusuri sumber data primer dan skunder, klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data atau pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membangun wawasan tentang keberadaan arsip yang tanpa disadari berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau. Arsip merupakan warisan dokumenter sekaligus sumber informasi dalam penguatan kebudayaan yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan. Kepulauan Riau memiliki karakteristik kuat berupa nilai-nilai budaya melayu dan Islam sebagai keunggulan dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi arsip secara menyeluruh berperan terhadap pembangunan berkelanjutan, mulai dari keberadaan arsip sebagai warisan budaya, pembentuk identitas dan citra daerah, tulang punggung manajemen, hingga penentu arah pembangunan.

A. Arsip sebagai Warisan Budaya dan Pembentuk Identitas

Salah satu manfaat pengelolaan arsip adalah untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan sejarah masa lalu, saat ini dan pencapaian masa depan. Selain arsip menjadi bukti kerja, arsip juga dapat membentuk identitas personal dan budaya (Sugiarto & Wahyono, 2005). Warisan budaya dimaknai sebagai sebuah ekspresi dari cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi, berupa kebiasaan, praktik, tempat, objek, ekspresi, dan nilai artistik (Effendhie, 2019). Warisan budaya sering dinyatakan berwujud atau tidak berwujud. Warisan budaya tidak berwujud atau Warisan Budaya TakBenda dipandang selaras dengan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Diwariskan dari generasi ke generasi, kemudian diciptakan kembali oleh berbagai komunitas kelompok sebagai respon dan interaksi terhadap lingkungan dan alam, serta

memberikan makna jati diri bagi mereka dalam memajukan budaya dan kreativitas.

Salah satu unsur warisan budaya adalah warisan dokumenter (*documentary heritage*), yaitu warisan budaya yang terdokumentasi berupa objek tekstual (buku, manuskrip, arsip), objek nontekstual (peta, film, dll), serta berkas elektronik (halaman situs, basis data, dll). Warisan Budaya Takbenda dapat diklasifikasikan dalam lima domain, yaitu: a) Tradisi Lisan dan Ekspresi; b) seni pertunjukan; c) adat istiadat masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan; d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan e) keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003*). Terdapat sebanyak 80 (delapan puluh) koleksi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Provinsi Kepulauan Riau yang semakin menambah karya budaya Indonesia. Warisan budaya yang telah turun temurun semakin menguatkan identitas dan jati diri Kepulauan Riau sebagai tanah melayu yang sarat dengan nilai-nilai budaya melayu dan Islam.

Tabel 3.1 Koleksi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Provinsi Kepulauan Riau

No	Domain	Jumlah	Nama Karya Budaya
1	Tradisi Lisan dan Ekspresi	13	Gurindam Dua Belas, Gazal, Pantun Melayu, Langlang Buana, Permainan Ambong Gile, Gasing Lingga, Permainan Tangkap Ayam, Tam-Tam Buku Lingga, Tuturan Asal Mula Nama Kampung Nerekeh, Legenda Patahnya Gunung Daik, Betingkah Alu Selesung, Legenda Gunung Daik, Permainan Anak-Anak Lingga
2	Seni Pertunjukan	12	Makyong, Gendang Siantan,

No	Domain	Jumlah	Nama Karya Budaya
			Gubang, Teater Bangsawan, Joget Dangkong, Tari Inai, Silat Pengantin Kepulauan Riau, Tari Merawai, Barodat Lingga, Zapin Kote, Gendang Bearak, Boria
3	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	24	Tepuk Tepung Tawar Kepulauan Riau, Mandi Syafar Kepulauan Riau, Ratib Saman Lingga, Syariful Anam Karimun, Tradisi Basuh Lantai, Tujuh Likur dan Pintu Gerbang Lingga, Berkhatam Al-Qur'an Lingga, Sunat Mudim, Bersih Tembuni Lingga, Bela Kampong, Perkawinan Adat Melayu Lingga, Pembacaan Hikayat Isra' Mi'raj Lingga, Kain Dagang Lingga, Nasi Sekone, Kain Tudung Hidang, Makan Sehidang Berlima, Tradisi Ketupat Lepas, Tradisi Makan-Makan Dibukit Datuk, Berzanggi Lingga, Tradisi Haul Jama', Tradisi Maulud Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Lingga, Manakib Samman Pulau Lingga, Adat Perkawinan Melayu Lingga, Malam Nisfu Syakban Lingga
4	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku	5	Bejenjang, Obat Cencang Rebus Lingga, Menyalo

No	Domain	Jumlah	Nama Karya Budaya
	mengenai alam dan semesta		Sagu, Pento, Tamban Salai
5	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional	26	Tudung Manto, Gasing Kepri, Bubur Lambok Lingga, Kue Mueh Pengantin Lingga, Kepurun Lingga, Tudung Saji Pandan Lingga, Layang-Layang Lingga, Kain Lipat 44, Aksesoris Adat Melayu Lingga, Kajang Lipat, Kain Telepuk Lingga, Baju Kurung Teluk Belange Lingga, Air Laksemane Mengamuk Lingga, Kue Bangkit, Kue Gelam, Kue Batang Buruk, Keripik Sagu Lingga, Aneka Lempeng Sagu Lingga, Baju Kebaya Laboh, Nasi Dagang Lingga, Kue Apam Lingga, Kalang, Kintau Lingga, Gubal, Bubur Asyura Lingga, Pengapit Santan.
	Total	80	

Sumber: <https://dapobud.kemdikbud.go.id/wbtb>, 2024

B. Citra Daerah Kepulauan Riau dalam Arsip

Dikenal dengan sebutan “*Bumi Segantang Lada*”, Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang strategis sehingga menjadi daya tarik bagi para pendatang sejak zaman periode kesultanan Riau. Adapun beberapa kerajaan besar melayu pernah berdiri di Kepulauan Riau, seperti Kemaharajaan Melayu (1513-1784), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), hingga Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913). Kerajaan

Riau Lingga (Daik) dan Kemaharajaan Melayu (berpusat di Pulau Bintan) merupakan kerajaan melayu terbesar yang berpengaruh terhadap sejarah dan warisan budaya di Kepulauan Riau.

Penelusuran sejarah Kepulauan Riau terekam dalam arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tahun 2007, Provinsi Kepulauan Riau menerima program citra daerah dari ANRI, berupa penyerahan hasil alihmedia dari khazanah arsip statis. Program Citra Daerah dalam arsip menjadi salah satu upaya pemberdayaan daerah, dimana arsip menjadi sumber informasi untuk mengaplikasikan langkah-langkah adaptif dan kontekstual terhadap perencanaan pembangunan daerah (Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip, 2007).

Arsip sebagai memori kolektif menyajikan data dan fakta yang mendukung warisan budaya melayu sebagai corak sejarah berdirinya Kepulauan Riau, yaitu dimulai dari periode Kesultanan Riau, periode Kolonial Belanda, hingga periode pasca kemerdekaan negara Indonesia. Koleksi arsip tekstual seperti manuskrip, buku serta arsip nontekstual berupa peta, film, dan arsip lainnya menggambarkan identitas Kepulauan Riau yang direpresentasikan dalam citra daerah Kepulauan Riau. Selanjutnya, Citra Kepulauan Riau dalam Arsip menjadi sumber informasi yang dapat merangsang tumbuhnya program-program pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan nilai budaya melayu. Hal ini sekaligus menjadi pemantik yang menghidupkan semangat dan motto Provinsi Kepulauan Riau yaitu “*Berpancang Amanah Bersauh Marwah*”. Makna ini selaras dengan tujuan dan cita-cita Kepulauan Riau menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan nilai-nilai budaya melayu dalam pembangunannya. Berikut khazanah arsip yang menggambarkan aktivitas maupun fenomena yang terjadi dalam sejarah berdirinya Kepulauan Riau sekaligus menunjukkan potensi pembangunan Kepulauan Riau pada sektor

pemerintahan, ekonomi, pertambangan, hingga sosial budaya.

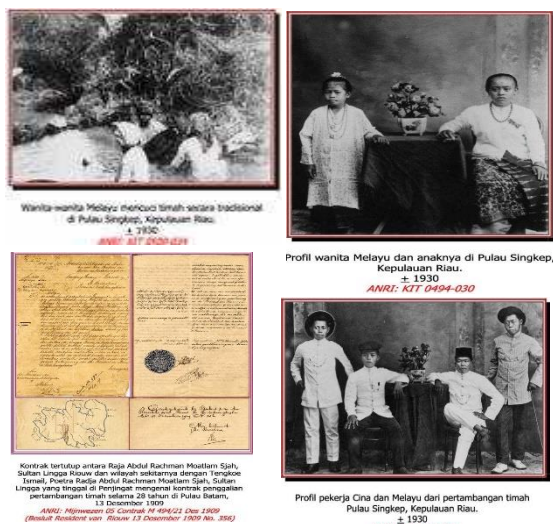


Gambar 3.1

Koleksi arsip tekstual dan non tekstual Periode Kesultanan Riau

Sumber: Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip, 2007

Gambar 3.1 menyajikan arsip-arsip yang berkaitan dengan potensi geografis Kepulauan Riau serta hubungan bilateral dalam sektor pemerintahan yang terbangun sejak periode Kesultanan Riau.



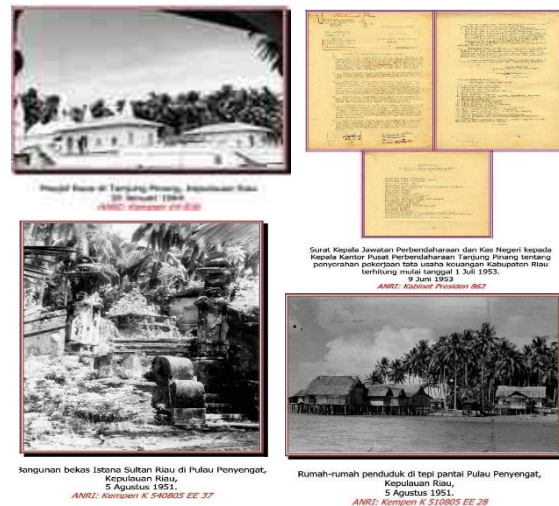
Gambar 3.2

Koleksi arsip tekstual dan non tekstual Periode Kolonial Belanda

Sumber: Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip, 2007

Gambar 3.2 merupakan kumpulan arsip aktivitas pertambangan masyarakat Kepulauan Riau pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Pertambangan atau penggalian timah dan bauksit menjadi salah satu potensi pembangunan Kepulauan Riau khususnya di Pulau Bintan, Batam, dan Lingga. Keterlibatan wanita-wanita pribumi hingga para pekerja cina dan melayu pada masa kolonial telah menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai budaya yang akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi.



Gambar 3.3

Koleksi arsip tekstual dan non tekstual Periode Pasca Kemerdekaan Indonesia

Sumber: Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip, 2007

Gambar 3.3 adalah koleksi-koleksi arsip yang menggambarkan keunikan dan keunggulan nilai budaya melayu dan Islam di Kepulauan Riau, salah satunya sejarah peninggalan Istana Sultan Riau di Pulau Penyengat. Memiliki pesona kuat sebagai warisan budaya melayu, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional untuk diusulkan sebagai warisan dunia (*world heritage*).

C. Arsip sebagai Tulang Punggung Manajemen dalam Pembangunan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa arsip memiliki peran vital dalam kehidupan berorganisasi. Sebagai sumber informasi yang dibutuhkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, maka arsip

menjadi tulang punggung manajemen yang mendukung kontinuitas dan produktivitas dalam kehidupan berorganisasi. Bahkan, kegiatan kearsipan menjadi salah satu indeks penilaian reformasi birokrasi saat ini. Salah satunya adalah kegiatan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI pada tingkat nasional maupun daerah. Tujuan pengawasan kearsipan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang professional, responsive dan aksesibel sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan pembentukan memori kolektif bangsa. Pedoman pengawasan kearsipan mengacu pada ketentuan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Khusus tingkat pemerintah daerah mulai efektif dilakukan sejak tahun 2020. Berdasarkan laporan hasil pengawasan kearsipan tingkat pemerintah daerah, nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3.2 Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun	Nilai Pengawasan	Kategori
2020	55,26	CC (Cukup)
2021	59,28	CC (Cukup)
2022	71,46	BB (Sangat Baik)
2023	73,96	BB (Sangat Baik)

Sumber: <https://www.anri.go.id>, 2024

Pengawasan kearsipan merupakan bentuk evaluasi terhadap pengelolaan arsip agar tertib, mudah diakses dan aman. Peran arsip sangat krusial sebagai basis data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Arsip menjadi sumber pemetaan berbagai isu dan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang nantinya dapat diformulasikan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan.

D. Peran arsip menjadi penentu arah Pembangunan Kepulauan Riau

John Freidmann dalam buku berjudul *“Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action (1987)”*, menyebutkan bahwa salah satu unsur perencanaan adalah selalu berorientasi ke masa depan (Setiadi & Widyawati, 2022). Sementara dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development approach*), dasar pelaksanaan program kerja yang digunakan adalah data-data periode sebelumnya yang melibatkan unsur fakta, tujuan, dan arah kebijakan. Data dan informasi tersebut terkandung dalam nilai guna arsip, dimana arsip memiliki nilai guna di masa lalu, masa kini hingga masa mendatang yang selaras dengan konsep *sustainable development approach*. Pendekatan ini membangun paradigma arsip sebagai acuan yang dapat menentukan arah pembangunan.

Dalam menyusun kebijakan strategis, arsip digunakan sebagai bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan manajemen pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RPJMD membutuhkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut berasal dari arsip dokumen perencanaan pada periode RPJMD sebelumnya, seperti hasil evaluasi RPJMD, data statistik lima tahun terakhir, Data RTRW, peraturan dan perundang-undangan terkait, data hasil analisis isu-isu strategis baik dibidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya, serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dan informasi menjadi unsur penting yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kepulauan Riau, yaitu *“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”*. Makna “Berbudaya” adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan

pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya melayu, dan budaya nasional. Korelasi setiap unsur dalam manajemen pembangunan daerah Kepulauan Riau menunjukkan bahwa keberadaan arsip penting dalam membentuk identitas Kepulauan Riau yang sarat dengan nilai budaya melayu dan Islam serta menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai basis dalam menciptakan visi misi pembangunan Kepulauan Riau.

E. Potensi Budaya dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kepulauan Riau

Salah satu keunikan sekaligus potensi dalam pembangunan daerah Kepulauan Riau adalah nilai budaya Melayu dan Islam sebagai *local wisdom* (kearifan lokal). Aspek kebudayaan secara nyata berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah bahkan bisa menjadi amunisi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa potensi kebudayaan yang dimiliki daerah menjadi alternatif penting dalam meningkatkan kontribusi di bidang ekonomi sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. (*Kebudayaan Dalam Perbandingan: Analisis Komparatif Atas IPK dan Enam Indeks Terkait*, 2023)

Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal berupa adat istiadat, tradisi, hingga pengetahuan teknologi merupakan warisan yang perlu dilestarikan sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan kebudayaan dan kearifan lokal dapat menjadi sumber daya ekonomi khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau menetapkan aplikasi GEMA EKRAF (*Berniage Bersama Ekonomi Kreatif*) sebagai aplikasi pemasaran produk/jasa bidang ekonomi kreatif. Selanjutnya, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif juga merencanakan pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota, salah satunya Kota Tanjungpinang. Berbagai jenis ekonomi kreatif yang menunjang wisata budaya berbasis kearifan lokal di Tanjungpinang mulai dari seni tari, seni musik, tekstil dan *fashion* (seperti kain tenun, pakaian adat/baju kurung melayu), kriya/produk kerajinan tangan, grafis dan komunikasi visual (yaitu seni grafis dengan visual melayu), hingga gastronomi (yaitu wisata budaya kuliner khas Melayu). Selain itu, beberapa kawasan wisata budaya/sejarah dan religi yang ikonik di Tanjungpinang seperti: Pulau Penyengat, Kawasan Sungai Carang Hulu Riau (Kota Rebah dan Kota Piring), Pulau Bayan, Klenteng Senggarang, Pulau Basing, Kompleks Makam Sultan/Yang Dipertuan Muda, dan Taman Budaya (*Sejarah, Budaya Dan Religi*, n.d.). Khazanah budaya yang tercatat sebagai Warisan Budaya Takbenda sangat terkenal seperti Gurindam Dua Belas, Pantun Melayu, hingga Adat Istiadat Tepuk Tepung Tawar. Adapun Kabupaten Lingga sebagai “*bunda tanah melayu*” juga banyak melahirkan Warisan Budaya Takbenda mulai dari adat istiadat dan tradisi, kerajinan tradisional, hingga berbagai kuliner khas melayu. Kepulauan Riau bahkan memiliki warisan dokumenter yang telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), yaitu Arsip Kamp Pengungsi Pulau Galang di Batam sebagai simbol dari “Wajah Humanisme Indonesia”. Kamp Sinam Pulau Galang ini dianggap memiliki potensi dan daya tarik sebagai wisata sejarah di Kota Batam.

Sebagai aset berharga yang memiliki nilai historis, warisan budaya harus dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi bukti yang

memperkuat karakteristik dan citra daerah. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya melayu sebagai kearifan lokal juga akan memberikan kesinambungan manfaat dan nilai yang dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Sebagaimana kajian para praktisi/akademisi dari Universitas Indonesia - *Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR)*, terdapat berbagai isu pembangunan kebudayaan di Kepulauan Riau yang masih perlu diperhatikan diantaranya: a) belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya; b) kurangnya promosi budaya melayu dalam memperkuat *brand image* kepri sebagai pusat kebudayaan melayu; c) kurangnya penyelenggaraan *event* seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional; dan d) arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-infiltrasi dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan. Permasalahan umum yang menjadi kendala dalam pembangunan sektor kebudayaan di Kepulauan Riau masih berakut seputar dukungan anggaran maupun infrastruktur, regulasi dan kebijakan, keterlibatan para *stake holder*, aksesibilitas dan sumber daya informasi dalam pengelolaan arsip-arsip yang bernilai sejarah. Isu dan permasalahan tersebut juga menyiratkan bahwa arsip juga berperan penting dalam pembangunan kebudayaan. Arsip sebagai warisan budaya memiliki nilai historis dalam penciptaan *branding/image* Kepulauan Riau sebagai pusat kebudayaan melayu sekaligus menjadi karakteristik dan arah pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Bidang kearsipan sejatinya berperan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Selain memiliki peran vital dalam tata kelola pemerintahan, arsip memiliki nilai guna informasi yang akan berpengaruh terhadap masa depan pembangunan

berkelanjutan, salah satunya adalah pembangunan kebudayaan. Arsip sebagai refleksi muatan budaya sekaligus membangun *branding* atau citra Kepulauan Riau sebagai tanah melayu yang sarat dengan nilai budaya dan agama. Nilai-nilai budaya melayu dan Islam sebagai kearifan lokal menjadi pondasi dalam membangun Kepulauan Riau yang berkarakteristik. Selanjutnya, aspek pembangunan kebudayaan juga memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan ekonomi berupa pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Hanya saja, pembangunan ekonomi kreatif berbasis budaya belum terorganisir dengan baik karena permasalahan dan isu terkait pembangunan kebudayaan khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Perlu upaya nyata dalam membangun aspek kebudayaan melayu sebagai faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau, diantaranya: a) melakukan restorasi arsip-arsip yang bernilai sejarah dan budaya melayu dengan melibatkan peran aktif lembaga kearsipan daerah; b) melakukan strategi promosi wisata budaya yang menarik dengan menggunakan *platform digital* ataupun sosial media; c) melaksanakan program edukasi dan aktualisasi nilai-nilai budaya melayu khususnya bagi Gen Z yang rentan terhadap *trend global*; d) menyusun skema regulasi dan kebijakan ekonomi berbasis budaya; dan e) membangun sinergitas antara pemerintah daerah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan media dalam pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata budaya di Kepulauan Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, D. (2023). Keberagaman Jadi Satu di Tanah Melayu: Belajar Pluralisme ke Kepulauan Riau. *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora: Mengembangkan Kehidupan Berbangsa Yang Lebih Beradab*, 112–122.
- Astuti, I. G. A. U. (2023). *Model Tata Kelola Kearsipan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Kanwil*

- Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan). Universitas Hasanudin.
- Citra Kepulauan Riau Dalam Arsip. (2007). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO* (2003).
- Daftar Warisan Budaya Takbenda di Indonesia. (n.d.). Retrieved September 1, 2024, from <https://dapobud.kemdikbud.go.id/wbtb>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Effendhie, M. (2019). *Publikasi dan Pameran Arsip* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Haditiya, D. M., & Mursyidah, L. (2024). Membuka Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi Kearsipan di Indonesia. *Indonesia Journal of Public Administration Review*, 1(3), 1–20.
- Indeks Pembangunan Kebudayaan. (n.d.). Retrieved September 1, 2024, from <https://ipk.kemdikbud.go.id>
- Kebudayaan Dalam Perbandingan: Analisis Komparatif atas IPK dan Enam Indeks Terkait. (2023).
- Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya di Tanjungpinang. (2019).
- Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah. (n.d.). Arsip Nasional Republik Indonesia. Retrieved September 1, 2024, from <https://www.anri.go.id>
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora. (n.d.). *Mengembangkan Kehidupan Berbangsa Yang Lebih Beradab*.
- Pudentia MPSS. (2021). *Justifikasi Warisan Budaya Takbenda*.
- Sejarah, Budaya dan Religi. (n.d.). Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. Retrieved September 1, 2024, from <https://disbudpar.tanjungpinangkota.go.id>
- Setiadi, H., & Widyawati. (2022). *Teori Perencanaan* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2005). *Manajemen Kearsipan Modern dan Konvensional ke Basis Komputer*. Grava Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tay, D. S. R., & Rusmiawari, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- Wai Yi Ma. (2017). The Role of Libraries in the United Nations Sustainable Development Goals. In P. B. Drake (Ed.), *27 th Annual PIALA Conference: Innovating Toogether: Enabling Libraries, Archives, and Museums for Sustainable Development* (pp. 30–42).